

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ekonomi di negara Indonesia, tak terhindarkan dari keberadaan musibah yang merebak yaitu pandemi Covid-19 yang sudah membuat kontraksi ekonomi di negara ini. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi angka pandemi COVID-19, seperti kebijakan *lockdown*, diberlakukannya skala besar dalam pembatasan sosial, serta aktivitas penduduk yang dibatasi sampai pada diterapkannya kehidupan new normal. Dan tidak terkecuali penurunan dari sektor ekonomi juga telah dirasakan oleh Indonesia hingga 2,07% (Caraka et al., 2021). Penurunan tersebut dikarenakan rendahnya konsumsi rumah tangga yang merupakan efek dari aktivitas sosial yang dibatasi untuk pencegahan Covid-19, penurunan investasi modal, termasuk pembangunan dan akuisisi aset tetap, dan pengeluaran pemerintah yang lebih rendah, termasuk belanja barang. Selain itu, perdagangan luar negeri telah turun tajam dan hal ini dirasakan oleh berbagai sektor, mulai usaha besar hingga usaha kecil menengah juga terkena imbasnya.

Tidak sedikit UMKM yang terimbas pandemi. Mulai dari usaha itu sudah dirintis sejak lama hingga mengalami penurunan omzet dan pada akhirnya mengurangi tenaga kerja yang dipekerjakan, tidak hanya itu masalah klasik pada UMKM pun masih menjadi permasalahan yaitu dalam hal pendanaan. Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi (Amani, 2021) mengungkapkan hambatan yang mesti dilewati Usaha Mikro Kecil dan Menengah di negara ini yang utama yakni pengalaman. Hal ini membuat UMKM sulit beradaptasi dengan

pembangunan. Yang kedua adalah kurangnya jaringan atau *network* yang membuat persaingan menjadi sulit. Ketiga, kurangnya pendanaan. Oleh karena itu mempertahankan fokus pengembangan dari UMKM perlu dilakukan karena dapat menjadi strategis untuk mengatasi ketidakpastian gejolak ekonomi global. UMKM merupakan mesin penggerak perekonomian nasional Indonesia karena unit lebih banyak daripada perusahaan besar. Mereka tersebar luas di seluruh daerah pedesaan serta potensial dalam menumbuhkan lapangan pekerjaan yang lumayan luas. Pertumbuhan serta perkembangannya bisa masuk menjadi elemen krusial dari kebijakan guna penciptaan peluang pekerjaan serta menghasilkan pendapatan. Hal ini harus didukung oleh Pemerintah agar perkembangan UMKM dapat terus meningkat, pemerintah Indonesia sedang melaksanakan PEN (Program Pemulihan Ekonomi Nasional). Tujuan dari program itu diinginkan untuk bisa memanjangkan nafas UMKM serta menaikkan kinerja dari Usaha Mikro Kecil & Menengah tersebut yang bisa memberi sumbangsih pada ekonomi bangsa. Melalui subsidi Rp 34,15 triliun yang mendukung, Rp 28.06 triliun berupa insentif pajak, serta Rp 6 triliun berupa kredit permodalan kerja baru untuk UMKM. Tidak hanya itu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga memberikan stimulus kredit untuk UMKM dengan dana Rp 27,26 triliun (Marginingsih, 2021). Dengan adanya dukungan ini UMKM dapat terus berkembang dan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Apalagi di situasi seperti sekarang ini, banyak perusahaan yang mengalami penurunan omzet dan memilih kebijakan untuk melakukan pengurangan jumlah pekerja atau bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk memangkas pengeluaran yang membebani unit usaha itu. Perihal tersebut membuat para pekerja berfikir dan berusaha untuk tetap bertahan hidup dengan jalan

membuka usaha baik usaha dagang maupun jasa serta ada pula yang banting stir menjadi petani.

Kondisi ini sangat dirasakan oleh masyarakat di Bali yang memang secara garis besar perekonomian di Bali bertumpu pada pariwisatanya. Dalam seminar web internasional yang berjudul *“Empowering Creative Industry to Rejuvenate the Economy During and After Covid-19 Pandemic”* Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati selaku Wakil Gubernur Bali mengungkapkan bahwa bertumbuhnya perekonomian di pulau dewata negatif (1,14)% di tahun 2020 triwulan pertama. Kemudian di triwulan kedua tahun 2020, perekonomian pulau dewata semakin menurun sampai angka negatif (10,98)%. Keterlambatan pada pertumbuhan tersebut merupakan akibat dari pendapatan di bidang pariwisata yang merosot tajam, padahal pariwisata sebelumnya merupakan sektor yang diandalkan pulau dewata. Semenjak wabah berawal di bulan Mei tahun 2020, banyaknya wisatawan yang mendatangi pulau dewata menurun sebanyak 99,97%. Di sektor pariwisata saja, Bali mengalami kerugian bulanan sekitar Rp9,7 triliun. Dinas Tenaga Kerja dan Sumber Daya Mineral Bali menyatakan pada 25 Mei 2020, 71.313 pekerja sektor reguler telah diberhentikan dan 2.570 kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, perkembangan industri kreatif harus dapat membawa Bali untuk bisa mengembangkan sektor pariwisata dan industri kreatif yang meningkatkan nilai pertambahan produknya lewat inovasi serta cara-cara kreatif yang secara nasional dianggap menjadi industri yang amat menguntungkan dengan banyaknya seni dan budaya yang dimiliki oleh provinsi Bali. Misalnya, Ubud diakui oleh UNWTO sebagai tujuan gastronomi global di 2019 lalu. Tidak hanya dikenal melalui karya seperti tari tradisional serta lukisan bernilai seni, tetapi kuliner lokalnya yang

potensi juga membuat Ubud menjadi terkenal. Maka dari itulah Pemprov di Bali membuat upaya mendorong industri kreatif khususnya Usaha Kecil Mikro dan Menengah dengan cara memberi dorongan dalam regulasi UU Gubernur No. 79/2018 dan UU Gubernur No. 99/2018 di mana mengatur tentang dimanfaatkannya produk lokal Bali yang dikonsumsi. Bukan cuma itu saja, namun pihak berwenang juga memperlonggar proses mencari izin dalam berinvestasi di Pulau Dewata guna menyokong peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, diadakan upaya mengembangkan SDM untuk industri kreatif yang dijalankan lewat rangkaian workshop ataupun pelatihan yang disesuaikan pada bidangnya misalnya bidang kuliner, seni, tata busana, dan lain-lain. Peningkatan mutu SDM itu akan turut meningkatkan nilai tambah dari produk kreatif. Bukan hanya berhenti sampai di sana, selanjutnya dari segi pembiayaan, pengajuan pinjaman untuk bagi perindustrian kreatif di Pulau Dewata bisa dilakukan dengan mudah serta ada dana bantuan langsung secara tunai yang sudah disiapkan dan diperuntukkan bagi UMKM oleh Pemprov Bali lewat program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Itu menjadi salah satu bentuk sokongan dari pemerintah serta instansi finansial terhadap perindustrian kreatif dalam upaya agar industri itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian dukungan aksesibilitas pasar pun merupakan bagian krusial saat mengembangkan perindustrian kreatif. Sudah direncanakan oleh pemerintah bahwa akan ada kampanye sejumlah program guna pembukaan akses ke pasar yang sangat luas. Saluran iklan dan program pasar terjangkau telah dimiliki oleh pemerintah, kemudian ada juga kampanye bertajuk "Jalan Jalan Bali" dan "Jelajahi Bali" yang bertujuan memberi dorongan penduduk untuk menjelajah

indahnyanya Pulau dewata sembari berpromosi berbagai produk lokal kreatif. Kami memberikan dukungan melalui program pendukung lainnya.

Kabupaten Buleleng pun tidak ingin mengandalkan bantuan dari Pemerintah saja, namun Kabupaten Buleleng turut serta bergerak bersama untuk membangun perekonomian dan pengembangan kualitas SDM pada Kab. Buleleng terkhusus pada UMKM. Usaha kecil menengah serta usaha kuliner khas di Kabupaten Buleleng mendapat dorongan dari I Nyoman Sutjidra selaku Wakil Bupati Buleleng untuk meningkatkan kapasitasnya. Utamanya sebagai bentuk usaha dalam memulihkan keadaan ekonomi di tengah wabah corona virus. Perihal itu dibicarakan di tengah acara Gebyar Kuliner Buleleng yang diadakan di Hotel Puri Saron Singaraja dan dihadiri oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagprinkop UKM) Buleleng. Acara tersebut ialah suatu usaha guna peningkatan kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Produk dari UMKM selain masakan, juga dipajang produk hasil pertanian. Didukung dengan adanya pelatihan dari Bali *Chef Community* yang semata-mata dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas dari kuliner yang ada di Buleleng agar memiliki kualitas dan tampilan yang bagus, hingga bisa membuat pengunjung tertarik mendatangi serta menyantap makanan khas Buleleng yang dimiliki. Selain itu terdapat juga kegiatan yang serupa yaitu kegiatan Gerakan Memajukan (GEMA) UMKM Buleleng yang diselenggarakan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koprasi Usaha kecil dan Menengah (Disdagperinkop-UKM) diikuti 40 UMKM di semua wilayah Kab. Buleleng yakni dilaksanakan di Krisna Beach Street Pantai Penimbangan. Aktivitas tersebut bertujuan untuk mengembalikan penjualan UKM Buleleng di masa pandemi COVID 19, selain untuk memulihkan perekonomian Buleleng. Dengan

menampilkan produk olahan dapat meningkatkan minat untuk mengunjungi toko dan berbelanja makanan dan kerajinan tangan.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh UMKM di Kabupaten Buleleng menandakan bahwa UMKM berkembang dengan baik. Perkembangan ini juga dapat diketahui pada banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kab. Buleleng di mana tiap tahunnya semakin meningkat. Tampak pada tahun 2021 Buleleng memiliki jumlah UMKM sebanyak 10.911 unit usaha formal dan 46.305 unit usaha non formal. Angka itu amat tinggi hingga sumbangsih Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk ekonomi di Buleleng amat mencolok, utamanya dari daya untuk menyerap para pekerja. Tetapi karena efek wabah virus corona maka Usaha Mikro Kecil dan Menengah dihadapkan pada masalah dalam perkembangannya, contohnya penjualan yang menurun, sulitnya bahan baku, menurunnya produksi, modal berkurang, distribusi yang mengalami keterlambatan, serta PHK karyawan adalah yang terparah. Guna membasmi masalah itu, tampaknya wajib diadakan analisa pada masalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan lebih terperinci. Lalu perlu dilakukan usaha untuk pengambilan aksi yang cocok dalam menanggulangi permasalahan itu. Demi menunjang ekonomi Kab. Buleleng, diharapkan UMKM bisa terus terjaga eksistensinya.

Kabupaten Buleleng yakni menjadi salah satu kabupaten terluas di Pulau Dewata yaitu dengan luas 1.364,73 km² dan jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 814.356 jiwa (Sania et al., 2021). Selain itu, Buleleng juga mempunyai pariwisata serta sumber daya yang besar yang membuat pemerintah sudah sewajarnya ikut andil dalam proses perkembangan untuk mensejahterakan daerah. Dengan banyaknya tempat pariwisata di Buleleng menyebabkan adanya berbagai bidang

UMKM di kabupaten ini yang wajib dikembangkan. Data UMKM di Buleleng bisa dilihat di bawah ini.

Melalui tabulasi yang ada di atas memperlihatkan kalau banyaknya jumlah UMKM di Buleleng di tahun 2018 hingga 7.918 unit usaha formal dan 26.634 unit usaha non formal, dan tahun 2019 mencapai 8.804 unit usaha formal dan 26.751 unit usaha non formal, lalu menyentuh angka 9.598 di tahun 2020 untuk unit usaha formal sedangkan ada 44.891 unit usaha non formal, kemudian pada tahun 2021

Tabel 1.1

**Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng
Tahun 2018 s/d 2021**

No	Klasifikasi Usaha	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Formal	Non Formal	Formal	Non Formal	Formal	Non Formal	Formal	Non Formal
1.	Usaha Mikro	4.368	20.834	5.114	20.934	5.709	38.961	7.007	40.304
2.	Usaha Kecil	3.344	5.796	3.481	5.813	3.655	5.921	3.662	5.992
3.	Usaha Menengah	189	4	192	4	217	9	225	9
4.	Usaha Besar	17	-	17	-	17	-	17	-
Total		7.918	26.634	8.804	26.751	9.598	44.891	10.911	46.305

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Buleleng, 2022

mencapai 10.911 unit usaha formal dan 46.305 unit usaha non formal. Dari data ini menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Buleleng tiap tahun meningkat lumayan pesat serta memperlihatkan peran saat menopang perekonomian di Kabupaten Buleleng.

Dari total UMKM yang terus berkembang dan ada sampai saat ini, menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang ingin coba membangun usahanya sendiri berbekal sejumlah modal yang dimiliki, ada juga rencana pemberian Bantuan Stimulus Usaha yang sumber dananya melalui APBD semesta berencana bagi pengusaha di Pulau Dewata dalam jangka waktu 3 bulan, dihitung dari Mei hingga bulan Juli tahun 2020 sebesar Rp 600.000,- perbulannya (Juliannisa et al., 2021). Sehingga semakin maraknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah bermunculan, membuat dibutuhkannya pelaporan finansial yang bermutu supaya memiliki manfaat saat menjalankan keberlangsungan usahanya.

Selain itu, mutu pelaporan finansial milik UMKM amat diperlukan oleh bank guna menjelaskan kapasitasnya untuk mengolah modal serta memprediksikan resiko gagalnya bisnis yang ia jalani. Perihal itu mendapat dukungan dari Peraturan Bank Indonesia No.14/PBI/2012 pasal 5 tentang pemberian pinjaman atau pembiayaan dari bank umum untuk mengembangkan UMKM dengan memberi kredit itu menjadi sebuah persyaratan sebuah informasi akuntansi yang berbentuk pelaporan keuangan yang disajikan Usaha Kecil Menengah. Kini ada dilema yang membebani perbankan. Berarti bank mempunyai kewajiban dalam penyaluran pinjaman UMKM berjumlah besar sebagaimana sebelumnya tak berjalan secara maksimal, namun sebagian besar UMKM punya masalah saat membuat informasi keuangan yang bermutu, hingga bisa mempengaruhi pihak perbankan untuk

melakukan evaluasi mengenai kemampuan UMKM untuk menghasilkan keuntungan yang baik (Rahmawan et al., 2020).

Mutu informasi finansial sangat penting di mana mesti sesuai pada laporan keuangan yang disusun sesuai standar yang diberlakukan. Sudah dibuat penyederhanaan pada SAK dari SAK-ETAP oleh pemerintah yang diharapkan bisa menolong UMKM untuk pembuatan pelaporan finansial yang bermutu serta SAK EMKM tersebut diberlakukan secara efektif di tanggal 1 Januari 2018 (Ayunin1 et al., n.d.). Kenyataannya, sebagian besar pengusaha menengah yang ada di Buleleng sudah tahu mengenai dasar akuntansi dan peraturan tentang SAK EMKM hingga semua siap serta bisa membuat susunan pelaporan keuangan yang memiliki mutu (Ayunin1 et al., n.d.).

Bertolak belakang dari survei yang dijalankan (Suastini et al., 2018) yang mengatakan kalau pada UMKM di Kabupaten Buleleng, ada 3 (tiga) UMKM yang tidak menggunakan laporan keuangan dengan alasan tidak membutuhkan laporan keuangan karena mereka memesan produk baru segera setelah tidak ada stok persediaan, dan ada 7 (tujuh) UMKM yang menggunakan laporan keuangan meskipun formatnya sederhana. Hal ini mengindikasikan mutu dari pelaporan finansial Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Buleleng ada di angka yang rendah karena masih terdapat beberapa pelaku UMKM yang merasa tidak begitu penting arti dari kualitas laporan keuangan usahanya, dan jika hal ini dibiarkan akan menyebabkan kesulitan dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam hal penilaian resiko bangkrutnya serta menyulitkan saat mengajukan kredit usaha permodalan.

Pelaporan keuangan ialah akhiran dari sebuah siklus akuntansi ataupun peringkasan dari transaksi finansial. Pelaporan keuangan ialah suatu wujud tanggung jawab dalam mengelola keuangan dan mesti memiliki mutu yang bagus dikarenakan dalam menginterpretasikannya berguna saat mengambil putusan-putusan. Tidak hanya itu informasi yang disajikan juga harus berkualitas tinggi guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Menurut Erna, (2020) menjelaskan untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi, harus berpedoman pada karakter dari laporan keuangan yang mudah dimengerti, memiliki relevansi, andal serta bisa dibandingkan. Jika laporan keuangan disusun melalui pencatatan yang kurang sempurna, Usaha Mikro Kecil dan Menengah tak mungkin bisa mengetahui kinerja bisnisnya serta tak bisa memperkirakan banyak hal. Maka, laporan finansial yang bermutu perlu agar dimiliki tiap UMKM supaya tujuannya dalam mencari laba bisa terus dijalankan.

UMKM selalu dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu berkaitan dengan permodalan, jauh sebelum adanya pandemi Covid-19 UMKM juga sudah dihadapkan pada permasalahan permodalan untuk kelangsungan hidup usahanya. Tak terkecuali UMKM yang ada di Bali dengan dasar UMKM yang sebagian bergerak di bidang pariwisata. Sehingga menurut datanya yang dikeluarkan dari Badan Peneliti, Pengembangan, dan Inovasi daerah Kab. Buleleng sebelum adanya wabah corona virus , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah susah mendapatkan akses modal mencapai 45,71%. Setelah pandemi, sulitnya akses pada modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Buleleng meningkat menjadi 71,4%. Kesulitan permodalan UMKM meningkat 25,7% di Kabupaten Buleleng. Hal ini menunjukkan dampak dari Covid-19 ini sangat signifikan terhadap permodalan

UMKM di Kabupaten Buleleng. Maka dari itu diperlukan upaya yang strategis bagi pengusaha UMKM supaya bisa mengakses permodalan dari bank dengan mengusahakan menyajikan laporan keuangan yang bermutu disesuaikan pada standarisasi yang diberlakukan.

Begitu banyak faktor yang berpengaruh pada mutu pelaporan finansial tersebut. Maka di riset berikut menggunakan beberapa faktor untuk membuktikan kualitas dari laporan keuangan itu. Yang pertama yaitu lamanya perusahaan didirikan, lama perusahaan ialah usia dari perusahaan itu awal berdiri sampai dengan dilakukannya riset ini yakni minimal lama usahanya lima tahun. Makin lama bisnis dijalankan maka bisa mengakibatkan berkembangnya bisnis yang bergerak ke arah positif ataupun negatif secara signifikan. Seperti pada kenyataannya sebagian besar usaha yang baru sebentar berdiri mesti dihentikan dikarenakan pengelolaan yang tidak bagus. Permasalahan itu sering diakibatkan karena masalah saat mengelola uang perusahaan itu. Permasalahan lainnya yang menjadi penyebab UMKM berumur pendek ialah sulitnya mengembangkan usahanya. Hal ini dikarenakan kurangnya modal. Pembiayaan modal harus dibiayai oleh perbankan, namun sebuah persyaratan untuk mendapatkan kredit itu haruslah menyertakan laporan keuangan milik perusahaan itu. Hal ini menuntut UMKM untuk menyusun laporan keuangan semaksimal mungkin. Penelitian mengenai lama usaha pernah dilakukan oleh (Fadilah, 2019) yang menyatakan bahwa umur berjalannya bisnis memiliki pengaruh yang secara parsial signifikan terhadap mutu pelaporan keuangan. Tetapi lain dengan riset yang dari (Dwi et al., 2020) yang mengatakan kalau ilmu akuntansi memiliki keberpengaruhan ke arah positif pada mutu pelaporan keuangan, di samping itu akuntansi yang berdasar pada SAK

EMKM, lama usaha, taraf pendidikan, serta ukuran perusahaan tak mempunyai keberpengaruh pada mutu laporan keuangan.

Budaya organisasi yang memiliki peran serta memberikan pedoman berperilaku untuk anggota perusahaan dalam bekerja merupakan salah satu faktor yang memberi pengaruh pada kualitas laporan keuangan. Dengan terciptanya pedoman kerja tersebut akan memacu kinerja karyawan agar dapat bekerja secara prima dan menghasilkan informasi keuangan yang relevan sehingga berdampak pada kualitas pelaporan finansial yang patut dengan standarisasi dalam akuntansi yang diberlakukan. Penelitian mengenai budaya organisasi pernah dilakukan oleh (Oktaviyanti et al., 2017), budaya etis organisasi mempunyai keberpengaruh yang signifikan ke arah positif terhadap pelaporan keuangan. Namun bertolak belakang dengan riset yang dijalankan (Ayem, 2021) di mana ia menemukan hasil kalau budaya organisasi itu tak memiliki pengaruh yang positif pada mutu pelaporan keuangan.

Sebuah teknologi dikatakan sebagai teknologi informasi ialah saat dimanfaatkannya seperangkat komputer sebagai pengolah data guna mendapatkan informasi yang memiliki manfaat bagi orang-orang (Amilia et al., 2021). Teknologi informasi mempunyai kebermanfaatan guna menolong percepatan dalam proses mengolah data-data transaksi finansial, tak berhenti sampai di sana teknologi informasi pun makin terlihat kemajuannya dalam mempermudah dilaksanakannya penginformasian keuangan dikarenakan kuat dan berpotensi untuk hasil yang tepat, konsisten, handal serta mampu memberi penyimpanan data yang besar. Dari manfaat yang diperoleh dalam penggunaan teknologi informasi tersebut ditemukan permasalahan bahwa pelaku usaha khususnya yang berskala mikro dan kecil pasti

enggan untuk menggunakan komputer sebagai perangkat untuk mencatat transaksi penjualannya dikarenakan biaya yang cukup mahal dan pemahaman akan teknologi yang tertinggal bagi pelaku usaha dengan umur usaha yang cukup lama. Mereka akan memilih untuk menggunakan nota berbentuk fisik dalam transaksi penjualannya dan nantinya dilakukan pencatatan secara manual. Penelitian mengenai teknologi informasi pernah dilakukan oleh (Suryanatha D & Ayu, 2021) menyatakan dimanfaatkannya teknologi penginformasian memiliki pengaruh signifikan ke arah positif terhadap mutu pelaporan keuangan. Namun lain dengan hasil riset dari (Made et al., 2020) di mana ia menemukan dimanfaatkannya teknologi informasi tak memiliki pengaruh terhadap mutu pelaporan keuangan.

Menurut Pohan, (2011) menjelaskan bahwa *tax planning* atau pajak yang direncanakan ialah suatu proses dalam mengorganisasikan usaha wajib pajak orang pribadi ataupun yang berbentuk badan usaha dengan mempergunakan celah-celah yang memungkinkan untuk dijalani organisasi sejalan dengan hal-hal yang sudah ditentukan pada aturan perpajakan sebagaimana diberlakukan, supaya organisasi bisa melakukan pembayaran perpajakan di angka yang minimal. *Tax planning* memiliki tujuan yang tidak untuk menghindari pembayaran perpajakan, tetapi guna mengelola pajak yang dibayarkan supaya tak melebihi besaran yang semestinya dibayar. Ada dorongan guna mengoptimalkan keuntungan setelah pajak (*after tax return*), dikarenakan perpajakan tersebut memberi pengaruh pada penarikan putusan ataupun perilaku saat menjalankan operasional bisnis. Serta pada pajak yang terencana bisa memotivasi wajib pajak supaya bisa melakukan pembayaran pajak dengan lebih efisien sehingga hal itu apabila telah dijalankan maka akan menolong pengambilan putusan terkait investasi di masa depan supaya bisa

merencanakan pajak yang bagus. Di sebuah bisnis tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan namun juga pajak yang efisien juga menjadi salah satu dari tujuan yang mesti diraih oleh perusahaan bersangkutan. Melalui *tax planning* yang bagus maka wajib pajak berusaha taat dalam pelaporan perpajakan yang berpedoman pada aturan perpajakan yang diberlakukan serta merencanakan keefektifan dalam merencanakan pajak (Hartanti, 2021). Penelitian mengenai perencanaan pajak pernah dilakukan oleh (Hartanti, 2021) menyatakan bahwa di UMKM yang ada di Kab. Tegal, perencanaan pajak atau yang disebut (*tax planning*) mempunyai keberpengaruh yang secara positif pada kualitas pelaporan keuangan.

Sejumlah temuan riset sebelumnya masih menjumpai ada hasil-hasil yang berbeda di setiap variabelnya yang diujikan. Riset tersebut memeriksa lagi faktor apa saja yang berpengaruh pada mutu pelaporan finansial Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Paparan di atas mendorong peneliti untuk menentukan judul penelitian ini yakni **“Pengaruh Lama Usaha, Budaya Organisasi, Teknologi Informasi, Dan *Tax Planning* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Latar belakang permasalahan yang sudah dikemukakan itu menjadi dasar bagi peneliti untuk pengidentifikasian permasalahan yakni seperti di bawah ini:

- 1.2.1 Masih terdapat penggiat bisnis berbentuk usaha mikro, kecil, menengah, ataupun besar di mana usahanya sudah dirintis sejak lama namun belum menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas;
- 1.2.2 Masih ada pelaku bisnis yang berskala mikro, kecil, menengah, ataupun besar di mana ia saat menjalankan usahanya tidak memiliki budaya yang mampu dijadikan pedoman dalam organisasi untuk melakukan pekerjaan, sehingga menyebabkan kinerja karyawan yang tidak baik serta memberi dampak terhadap mutu pelaporan finansial yang disajikan.
- 1.2.3 Masih ada pelaku bisnis berskala mikro, kecil, menengah ataupun skala besar di mana ia enggan untuk menggunakan komputer sebagai perangkat untuk mencatat transaksi penjualannya, hingga pelaporan finansialnya tidak memiliki kualitas yang bagus.
- 1.2.4 Masih terdapat penggiat bisnis berskala mikro, kecil, menengah ataupun skala besar di mana ia tidak melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) ataupun yang terparah adalah ia tak melakukan pembayaran perpajakan yang menyebabkan pelaporan keuangannya tak bisa diandalkan serta disesuaikan dengan karakteristik mutu laporan finansial itu sendiri.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan permasalahan yang diambil peneliti dijalankan supaya peneliti fokus membahas sesuai pada pokok masalah yang telah ditentukan. Maka dari itu peneliti membuat pembatasan masalah tentang lama usaha, budaya organisasi, teknologi informasi, serta perencanaan pajak serta penulis menggunakan objek UMKM yang

tercatat pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koprasi, UMKM yang ada di Kab. Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Bila dilihat dari pengidentifikasian permasalahan serta batasan permasalahan yang sudah ditentukan itu maka di riset berikut peneliti bisa membuat rumusan pokok masalahnya yakni:

- 1.4.1 Bagaimana pengaruh lama usaha terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng ?
- 1.4.2 Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng ?
- 1.4.3 Bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng ?
- 1.4.4 Bagaimana pengaruh *tax planning* terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berangkat dari perumusan permasalahan itu kemudian tujuan diadakannya riset berikut ialah:

- 1.5.1 Untuk menguji adanya pengaruh lama usaha terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng
- 1.5.2 Untuk menguji adanya pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng

- 1.5.3 Untuk menguji adanya pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng
- 1.5.4 Untuk menguji adanya pengaruh *tax planning* terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Setiap riset yang dilakukan diharap supaya bisa memberi kebermanfaatan untuk siapa saja yang membacanya atau terlibat langsung dengannya. Peneliti mengharapkan supaya riset ini memberi manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil riset yang diharap ialah supaya bisa memperluas wawasan dan pengetahuan terkait pengaruh lama usaha, budaya organisasi, teknologi informasi, serta dijalankannya perencanaan perpajakan pada mutu pelaporan keuangan UMKM di Kab. Buleleng serta bisa dijadikan rujukan untuk riset di masa mendatang.

1.6.2 Manfaat Praktisi

1.6.2.1 Bagi Peneliti

Tujuan dari riset berikut ialah guna memberi peluang pada peneliti lainnya dalam mengimplementasikan keilmuan yang sudah diperolehnya tentang Ilmu akuntansi selama perkuliahan.

1.6.2.2 Bagi Pelaku Usaha

Temuan dari riset berikut diharap bisa memecahkan masalah dan memberi wawasan tentang lama usaha, budaya organisasi, teknologi

informasi, serta *tax planning* pada kualitas laporan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng

1.6.2.3 Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Diharapkan riset berikut bisa memberi sumbangsih untuk perguruan tinggi serta nanti akan bisa menjadi pelengkap kajian pustaka yang bisa dipakai periset lain yang akan menjalankan penelitian yang sama ataupun penelitian yang mirip dengan riset saat ini.

